



KATA PENGANTAR

Renstra Perubahan Badan Kesbangpol adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dan sangat berhubungan dengan tugas dan fungsi dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis diantaranya :

Renstra Perubahan disusun berpedoman pada RPJMD sesuai Tugas dan Fungsi

- Renstra Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 tahun
- Renstra Perubahan adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.
- Renstra Perubahan adalah acuan dalam penilaian kinerja oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal

Renstra Perubahan wajib disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD yang meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Badan Kesbangpol berkewajiban menyiapkan Renstra Perubahan yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra Perubahan tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kubu Raya



Pembina Utama Muda
NIP 19630623 198503 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
BAB II	6
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAKESBANGPOL	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
BAB III	31
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
3.1. Identifikasi Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya	31
3.2. Telahan Visi, Misi, dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih....	32
3.3. Cek dan Telaah Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Provinsi.....	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	40
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV	42
TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol	42
BAB V	44
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol	44
5.2. Arah Kebijakan	46
BAB VI	50
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	50
SERTA PENDANAAN BANKESBANGPOL.....	50
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	50
BAB VII	68
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII	72
PENUTUP	72



DAFTAR TABEL

2.1.	Tabel Sumber daya aparatur berdasarkan pendidikan	14
2.2.	Tabel Sumber daya aparatur berdasarkan golongan	15
2.3.	Tabel Sumber daya aparatur berdasarkan eselon	16
2.4.	Tabel Presentase Perbandingan Anggaran	18
2.5.	Daftar Inventaris kantor.....	20
2.6.	Tabel Pencapaian Kinerja Bakesbangpol	24
2.7.	Tabel Anggaran dan Realisasi	27
4.1.	Tabel Tujuan dan sasaran bakesbangpol	43
5.1.	BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA	45
5.2.	Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Bakesbangpol	48
6.1.	Tabel Program dan Kegiatan Bakesbangpol.....	51
6.2.	Tabel Rencana Program dan kegiatan besrta pagu indikatif Bakesbangpol	52
7.1.	Tabel Visi Bakesbangpol	71

DAFTAR GAMBAR

2.1	Gambar struktur Bakesbangpol.....	17
-----	-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra Perubahan disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kubu Raya adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bakesbangpol Kubu Raya untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kubu Raya. serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Penyusunan Renstra Perubahan Bakesbangpol Kubu Raya dilakukan dengan tahapan pengkajian terhadap sejumlah dokumen, RPJMD Kubu Raya 2019-2024, RTRW, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Perubahan Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, dan hasil capai dokumen rencana periode 2014-2019. Permasalahan dan issu strategis hasil kajian oleh Tim Penyusun Renstra Perubahan, diranformasikan ke dalam Tujuan dan sasaran, strtaegi dan arah kebijakan, untuk selanjutnya dipetakan menjadi indikator



kinerja yang terukur yang mengerucut pada peran Bakesbangpol dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah periodesasi 2019-2024. Proses berikutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun tersebut diberifative dan digunakan oleh bidang dan subbidang berikut seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya menjadi program/kegiatan tahunan yang tertuang dalam dokumen APBD setelah melalui pembahasan dan kesepakatan kepala daerah bersama-sama DPRD Kabupaten Kubu Raya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
3. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Pemendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Kemendagri 050 – 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
16. Peraturan Daerah Provinsi nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025.
17. Peraturan daerah Provinsi Kalbar Nomor 1 tahun 2021 tetang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 (lima) Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No 15 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Kedudukan dan Sususnan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.



1.1 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah :

1. Memberikan arah, pedoman dan kebijakan pejabat/staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Menyediakan dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai kebutuhan di Kabupaten Kubu Raya.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Sebagai kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
2.1.	Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bakesbangpol
2.2.	Sumber Daya Bakesbangpol
2.3.	Kinerja Pelayanan Bakesbangpol
2.4.	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bakesbangpol
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
3.3.	Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
1.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1.	Strategi
5.2.	ArahKebijakan
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAKESBANGPOL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya, merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Penyelanggaraan kebijakan dan penyelenggraraanurusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Penyelenggaraan administrasi Badan.
5. Pembinaan dan penyelenggraan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan.
7. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Peyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bakesbangpol, terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melporkan dan melaksanakan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Bupati dan perturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan



penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepengawaihan, perlengkapan dan umum.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di badan;
- b. pembagian tugas, pemberina petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas, di badan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalai kegiatan di badan.
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di badan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi:

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan Penyusunan program kegiatan di Sub bagian Rencana kerja dan keuangan.
 - b. Penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan keuangan.
 - c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengelolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas rencana kerja dan keuangan.
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang rencana kerja dan keuangan.
 - e. Penyiapan bahan pemantauan dab evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan keuangan. dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - f. pelaksanaan tugas laian yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama:
- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama ;
 - b. pembagian tugas, pemberina petunjuk kerja, penyalinan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- e. pengendalian kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama membawahi :

- (1) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas ideologi dan wawasan kebangsaan.

Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan prongram kegiatan di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;



- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan:

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyediaan kegiatan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas politik dalam negeri. sub bidang politik dalam negeri mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan sub bidang politik dalam negeri;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang politik dalam negeri;



- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas politik dalam negeri;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang politik dalam negeri;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang politik dalam negeri;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas organisasi kemasyarakatan. sub bidang organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bidang organisasi kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang organisasi kemasyarakatan;
 - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas organisasi kemasyarakatan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang organisasi kemasyarakatan;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang organisasi kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen, serta penanganan konflik. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai lingkup tugasnya;



- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen, serta penanganan konflik;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;
 - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan prumusan kebijakan pembinaan penyelenggaran tugas kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;
 - e. penyiapan bahan pemantauana dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas penangan konflik. Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Perancanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bidang penanganan konflik;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanganan konflik;



- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan prumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas penanganan konflik;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang penanganan konflik;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanganan konflik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian Bakesbangpol Kab. Kubu Raya sampai dengan Tahun 2020 berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Bakesbangpol sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1 di bawah ini:



Tabel 2.1
SUMBER DAYA APARATUR BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	7	30,44
2.	S-1	12	52,7
3.	Diploma	2	8,43
4.	SLTA	2	8,43
Jumlah		18	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bakesbangpol Kab.Kubu Raya, 2020

Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) sebanyak 12 orang atau 52,7% dan yang berpendidikan S2 (Pascasarjana) sebanyak 7 orang atau 30,44%. Jadi secara umum sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :



Tabel 2.2

**SUMBER DAYA APARATUR BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2020**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	6	33,33%
2.	Penata	9	50,00%
3.	Pengatur	3	16,67%
4.	Juru	-	0
Jumlah		18 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bakesbangpol Kab.Kubu Raya, 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut, diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata sebanyak 9 orang atau 50,00% dan Pembina sebanyak 6 orang atau 33,33%.

Selanjutnya sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :



Tabel 2.3

**SUMBER DAYA APARATUR BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELON TAHUN 2020**

NO.	ESELON	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	II.b	1 orang
2.	III.a	1 orang
3.	III.b	3 orang
4.	IV.a	8 orang
5.	Pelaksana	5 orang
Jumlah		18 orang

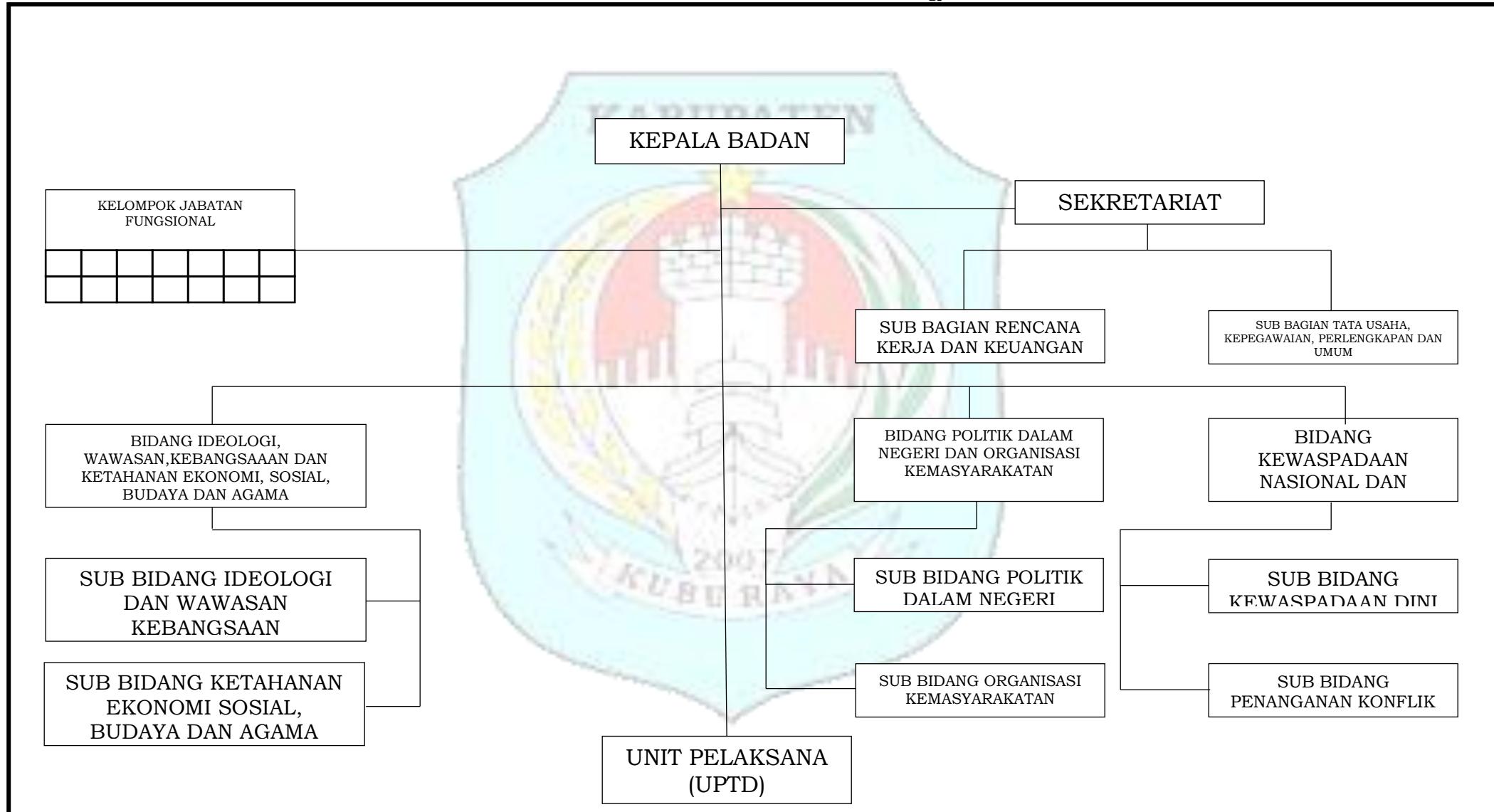
Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Bakesbangpol Kab.Kubu Raya, 2020

Dari Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa untuk eselon II.b atau Kepala Bakesbangpol sudah terisi, sedangkan eselon III.a, III.b dan IV.a sudah terisi lengkap. Pejabat eselon IV rata-rata belum memiliki staf.

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar berikut :



2.1 Gambar struktur Bakesbangpol





Sumber Daya Keuangan Bakesbangpol

Seluruh pembiayaan belanja Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019

Tabel 2.4

**PERSENTASE PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
BAKESBANGPOL TERHADAP BELANJA LANGSUNG
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009-2020**

TAHUN	BELANJA LANGSUNG BAKESBANGPOL	BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA	%
2009	380.794.668,00	200.411.969.048,00	0,19
2010	569.380.671,00	346.676.797.175,00	0,16
2011	694.171.824,00	435.169.407.010,00	0,16
2012	572.463.727,00	456.261.069.328,00	0,13
2013	721.948.884,00	510.939.529.812,00	0,14
2014	831.934.388,00	602.715.059.545,24	0,14
2015	574.219.355,00	650.450.278.729,00	0,09
2016	620.298.600,00	587.940.281.300,13	0,11
2017	1.069.761.650,00	727.246.082.380,00	0,15
2018	955.809.000,00	773.403.156.678,00	0,12
2019	1.065.139.650,00	879.757.007.138,55	0,12
2020	671.951.300,00	283.244.800,00	24,65

Sumber : Data Keuangan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2019



Sarana dan Prasarana Bakesbangpol

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya didukung sarana dan prasana. Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berikut daftar sarana dan prasarana Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya yang tersedia sampai dengan Tahun 2020 seperti pada Tabel 2.5 sebagai berikut:



Tabel 2.5
DAFTAR INVENTARIS KANTOR BAKESBANGPOL TAHUN 2020

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Sepeda Motor	4
2	Lemari Besi	3
3	Filling Besi	1
4	Mesin Absensi	1
5	Band Kas	1
6	Lemari Kaca	3
7	Proyektor+attachment	1
8	Printer	8
9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
11	Kursi Kerja Kayu	7
12	Kursi Tamu	1
13	Kursi Putar	9
14	Meja Komputer	1
15	Camera Film	1
16	Pesawat Telephon	8
17	Facsimile	1
18	Laptop	5
19	AC unit	4
20	Jenset	1
21	PC	3

Sumber : Data Aset Bakesbangpol Kab. Kubu Raya, 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Esensi kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan suatu gambaran mengenai peran identitas dalam suatu lingkup organisasi secara luas. Gambaran pelayanan Bakesbangpol didasarkan pada kewenangan Bakesbangpol dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, bidang ketahanan bangsa, serta bidang politik dalam negeri.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2019 Tentang



Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya, bahwa Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah Penunjang yang bertanggungjawab di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, bidang ketahanan bangsa, serta bidang politik dalam negeri. Selain menjaga kondusifitas wilayah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya juga memiliki fungsi “penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan”. Penguatan wasasan kebangsaan yang diartikan sebagai cara pandang Bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ipoleksosbudhankam mutlak dibutuhkan untuk memelihara kondusivitas wilayah dan menjaga keutuhan NKRI.

NKRI memiliki bentuk negara demokrasi dimana pemerintahan dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem negara demokrasi juga menjamin hak-hak warga negaranya untuk mengeluarkan pendapat. Secara lebih khusus, hal itu diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Sebagai wujud pengaplikasian pasal tersebut adalah diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut ormas, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. “Partisipasi dalam pembangunan” itulah yang ditekankan dalam memfasilitasi kegiatan ormas, agar kegiatan ormas memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, fasilitasi Ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya diarahkan untuk meningkatkan kemanfaatan ormas. Jumlah ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu organisasi kemasyarakatan yang menyediakan produk-produk pelayanan publik, memang jumlahnya kian meningkat namun hal itu tetap harus ditingkatkan lagi mengingat kebebasan berdemokrasi juga berpotensi memunculkan ormas yang meresahkan masyarakat maupun ormas-ormas radikal.



Dalam konteks tersebut Badan Kesatuan Bangsa terus melakukan pembinaan, meningkatkan kwalitas kinerja dan dituntut mampu melaksanakan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Undang-Undang dan Pancasila, sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam melaksanakan kegiatan di 9 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya .
2. Sebagai pelaksana kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan dan Implementasi Penyuluhan Bela Negara.
3. Melakukan monitoring Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
4. Tersalurnya bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.
5. Terlaksananya pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) secara langsung dan damai.
6. Sebagai pelaksana pembinaan Sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Umum (PEMILU) kepada masyarakat.
7. Sebagai fasilitasi Pembinaan terhadap Partai Politik (PARPOL).
8. Sebagai fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal seperti POLRI, TNI, KEJAKSAAN, BANK BPD, IMIGRASI, ANGKASAPURA dan BIN melalui Rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kubu Raya dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Melakukan pembinaan P4GN (Pencegahan, Penyalahgunaan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika) terhadap masyarakat disemua kalangan.



2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :



Tabel 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Jumlah Pembinaan Terhadap Wawasan Kebangsaan.	-	100%	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	
2	Jumlah Pembinaan Politik dan Peserta Pemilihan Umum (PEMILU) se Kabupaten.	-	100%	9 Kec. di 9 Kec.	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan di Kab.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan di Kab.	9 Kec.	9 Kec.	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan di Kab.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	1 Kegiatan di Kab.	
3	Jumlah Pembinaan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah.	-	100%	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	-	100%	29 Kegiatan.	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDÁN KESATUÁN BÁNGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Jumlah Pembinaan Terhadap Wawasan Kebangsaan.	-	100%	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	
2	Jumlah Pembinaan Politik dan Peserta Pemilihan Umum (PEMILU) se Kabupaten.	-	100%	9 Kec. di 9 Kec.	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan di Kab.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan di Kab.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan di Kab.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	1 Kegiatan di Kab.	
3	Jumlah Pembinaan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah.	-	100%	1 Kegiatan di Kab.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	1 Kegiatan.	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	-	100%	29 Kegiatan.	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %



Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa terus melakukan pembinaan, meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Undang-Undang dan Pancasila untuk meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain adalah :

- a. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk turut menjaga dan memelihara kondusivitas wilayah, misalnya melalui pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat);
- b. Menyusun database kerawanan sosial untuk mengurangi potensi kerawanan sosial melalui peningkatan upaya preventif dan pre-entif;
- c. Meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan untuk menurunkan potensi konflik yang berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);
- d. Meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik untuk menurunkan angka konflik politik serta mewujudkan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang berkualitas dengan mengarahkan pemilih menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

Tabel 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	BELANJA.	1.325.356.948	1.473.517.973	2.098.564.950	1.593.529.240	1.779.358.977	5.467.989.361	4.966.687.897	7.243.136.294	10.041.518.972	1.871.070.285	83,85%	91,50%	95,09%	100%	100%		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG.	751.137.593	853.219.373	1.028.803.300	637.720.240	714.219.327	640.990.132	2.327.456.272	2.949.881.000	3.182.346.400	805.930.635	96,86%	91,39%	100%	100%	100%		
5.1.1	Belanja Pegawai.	751.137.593	853.219.373	1.028.803.300	637.720.240	714.219.327	2.321.879.778	2.327.456.272	2.949.881.000	3.182.346.400	805.930.635	96,86%	91,39%	100%	100%	100%		
5.2	BELANJA LANGSUNG.	574.219.355	620.298.600	1.069.761.650	955.809.000	1.065.139.650	1.191.604.140	2.639.231.625	4.293.255.294	6.859.172.572	1.065.139.650	76,28%	91,59%	91,99%	100%	100%		
1.19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	195.923.955	203.450.000	316.084.000	282.603.700	372.080.018	409.983.953	356.852.573	428.316.419	340.499.176	372.080.018	84,28%	82,31%	86,74%	100%	100%		
1.19.1	Penyediaan jasa surat-menyerat.	39.620.000	40.000.000	46.298.100	49.200.000	49.200.000	39.620.000	39.780.000	46.238.100	5.878.922	49.200.000	100%	100%	99,96%	100%	100%		
1.19.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.880.000	3.000.000	6.200.000	3.000.000	99,50%	100%	100%	100%	100%		
1.19.1	Penyediaan alat tulis kantor.	15.000.000	15.000.000	21.037.150	23.024.600	23.024.600	14.900.000	14.920.500	26.100.000	26.100.000	23.024.600	99,33%	99,47%	100%	100%	100%		
1.19.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	6.000.000	6.000.000	3.168.000	2.589.000	2.589.000	5.888.900	4.496.000	3.147.400	26.198.200	2.589.000	98,15%	100%	99%	100%	100%		
1.19.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.430.000	3.324.000	3.520.000	19.799.850	4.000.000	85,75%	83,10%	88%	100%	100%		
1.19.1	Penyediaan makan dan minum.	10.000.000	10.000.000	9.900.000	7.800.000	7.800.000	10.000.000	5.000.000	9.400.000	15.000.200	7.800.000	100%	100%	95%	100%	100%		
1.19.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	73.303.955	77.450.000	106.840.000	141.220.000	141.220.000	73.303.955	42.626.000	88.258.700	7.190.253	141.220.000	100%	84,19%	82,61%	100%	100%		
1.19.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.	30.000.000	33.000.000	39.785.000	24.792.000	24.792.000	30.000.000	24.739.500	32.066.000	17.734.925	24.792.000	100%	100%	81%	100%	100%		
1.19.1	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor.	5.000.000	5.000.000	51.725.400	975.400	975.400	4.758.500	5.000.000	-	141.496.700	975.400	95,17%	100%	-	100%	100%		
1.19.1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).	10.000.000	10.000.000	3.437.650	2.602.700	2.602.700	5.700.000	4.625.000	3.029.650	74.900.126	2.602.700	57,00%	82,59%	88,13%	100%	100%		
1.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	79.945.000	123.975.000	181.936.000	105.650.850	70.640.451	195.334.300	212.269.400	355.128.900	76.461.000	70.640.451	90,11%	95,79%	93,91%	100%	100%		
1.19.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	16.678.000	-	28.000.000	-	-	-	-	25.304.000	76.461.000	-	-	-	91%	100%	100%		
1.19.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	5.000.000	7.500.000	15.000.000	-	-	5.000.000	7.500.000	14.500.000	10.000.000	-	100%	100%	97%	100%	100%		
1.19.1	Pengadaan peralatan gedung kantor.	16.475.000	11.475.000	33.005.400	-	-	15.000.000	11.000.000	24.000.000	51.535.000	-	91,05%	95,86%	73%	100%	100%		
1.19.1	Pengadaan mebelleur.	5.000.000	-	41.200.000	-	-	5.000.000	-	41.200.000	4.986.000	-	-	99,63%	99,70%	100%	100%		
1.19.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	4.000.000	5.000.000	5.000.000	8.824.000	8.824.000	4.000.000	2.500.000	9.955.000	9.940.000	8.824.000	100%	100%	100%	100%	100%		
1.19.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	10.792.000	10.000.000	9.320.000	9.178.850	9.178.850	10.786.100	6.375.546	259.975.000	-	9.178.850	99,95%	98,36%	92,72%	100%	100%		
1.19.1	Pemeliharaan rutin/berkala komputer.	4.000.000	5.000.000	5.000.000	4.648.000	4.648.000	4.000.000	4.991.000	5.000.000	-	4.648.000	100%	100%	100%	100%	100%		
1.19.1	Pemeliharaan listrik dan penambahan daya.	18.000.000	20.000.000	23.400.000	-	23.400.000	10.538.458	8.822.787	12.942.521	-	23.400.000	55%	73,52%	-	100%	100%		
1.19.1	Pengadaan sewa gedung kantor.	-	65.000.000	80.000.000	83.000.000	83.000.000	50.000.000	65.000.000	80.000.000	-	83.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
1.19	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	6.980.000	18.051.000	-	-	-	7.040.000	17.238.000	-	47.750.000	-	96,97%	95,50%	-	100%	100%		
1.19.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	5.000.000	7.020.000	-	-	-	5.000.000	7.020.000	-	47.750.000	-	100%	100%	-	100%	100%		
1.19.1	Pengadaan pakaian olahraga.	1.980.000	-	-	-	-	1.760.000	-	-	-	-	88,89%	-	-	100%	100%	-	-



RENSTRA PERUBAHAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

1.19.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu/batik.	-	1.998.000	-	-	-	-	1,998.000			-	-	100%		100%	100%		
1.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	33.000.000	33.000.000	40.628.100	-	-	69.817.150	43.133.586	91.233.100	36.569.730	-	59,81%	67,20%	99,78%	100%	100%		
1.19.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	28.000.000	28.000.000	-	-	-	27.888.200	-	-	25.426.150	-	99,60%	-	-	100%	100%		
1.19.1	Penyusunan evaluasi jabatan (EVAJAB) SKPD.	5.000.000	5.000.000	4.029.150	5.638.000	-	4.000.000	2.228.000	4.029.150	5.638.000	-	80,00%	89,12%	83%	100%	100%		
1.19.1	Penyusunan analisis jabatan (ANJAB) SKPD.	-	-	3.240.950		-	-	-	2.934.950		-	-	-	91%	100%	100%		
1.19.1	Diklat Intelijen Dasar, Lanjutan dan Tim Fasilitasi Pembauran Kebangsaan dan Diklat Keuangan.	-	-	32.560.000		-	-	-	7.717.600		-	-	-	24%	100%	100%		
1.19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	52.500.000	40.000.000	32.000.000	34.515.900	-	-	-	5.505.600	5.505.580	-	-	-	99,35%	100%	100%	-	-
1.19.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	7.500.000	10.000.000	3.348.350	20.230.900	20.230.900	6.590.000	5.546.000	3.042.350	-	20.230.900	87,87%	95,62%	91%	100%	100%	-	-
1.19.1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.	10.000.000	10.000.000	3.669.500	3.125.400	3.125.400	6.000.000	2.450.000	2.934.950	-	3.125.400	60,00%	100%	80%	100%	100%	-	-
1.19.1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	20.000.000	10.000.000	5.437.200	3.602.900	3.602.900	20.000.000	2.000.000	4.435.200	34.964.399	3.602.900	100%	100%	82%	100%	100%		
1.19.1	Penyusunan LPPD SKPD.	15.000.000	10.000.000	3.445.000	2.740.400	2.740.000	10.499.800	2.000.000	3.139.000	7.785.051	2.740.000	100%	100%	91%	100%	100%		
1.19.1	Penyusunan Rencana Kerja RKA, DPA dan DPPA.	-	-	8.442.300	4.816.300	4.816.300	-	-	7.362.300		4.816.300	-	-	87%	100%	100%		
1.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	25.800.000	24.417.000	32.149.900									100%	100%	100%		
1.19.1	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akurala).	-	17.000.000	17.540.000	19.500.000	19.500.000	-	8.410.000	17.540.000		19.500.000	-	98,40%	79%	100%	100%		
1.19.1	Fasilitasi penataan/pengelolaan aset pada SKPD.	10.000.000	8.800.000	3.924.050	2.899.900	9.750.000	7.002.000	-	3.924.050		9.750.000	70,02%	-		100%	100%		
1.19.1	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset	-	-	-	9.750.000										100%	100%		
1.19	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	9.750.000	-	-	-	3.475.309	7.861.650	7.710.450	4.386.000	4.256.981	3.475.309	52,41%	100,00%	94,20%	100%	100%		
1.19.1	Pemantauan orang asing.	9.750.000	-	-	-	-	9.750.000	-	-	6.652.462	-	88,73%	-	-	100%	100%		
1.19	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	96.915.000	59.000.000		141.824.400	-	-	6.752.350	-	-	-	-	68,60%	-	100%	100%		
1.19.1	Fasilitasi koordinasi peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kubu Raya.	81.715.000	41.000.000	55.813.350	57.728.900	57.728.900	65.828.550	24.940.000	54.139.250	871.381.630	57.728.900	80,56%	96,03%	97%	100%	100%		
1.19.1	UP dating data Organisasi Masyarakat/Lemabaga Swadaya Masyarakat (ORMAS/LSM).	1.000.000	3.000.000	3.233.700	2.350.500	2.350.500	1.000.000	3.000.000	3.233.700	53.906.250	2.350.500	100%	100%	100%	100%	100%		
1.19.1	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kubu Raya.	14.200.000	15.000.000	22.469.200	35.136.500	35.136.500	9.795.200	15.000.000	19.139.150	123.426.950	35.136.500	85%	100%	85%	100%	100%		
1.19.1	Pengiriman Calon Peserta Pendidikan Bela Negara.	-	-	19.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%		
1.19.1	Seminar Wawasan Kebangsaan.	-	-	100.000.000	34.528.000	34.528.000	-	-	91.005.550		34.528.000	-	-	91%	100%	100%		
1.19.1	Implementasi Penyuluhan Bela Negara.	-	-	-	12.080.500	12.080.500					12.080.500				100%	100%		
1.19	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	48.260.000	56.675.050	166.259.700	202.530.800		101.151.350	77.944.750	108.587.100	105.602.643		79,41%	90,13%	88,47%	100%	100%		
1.19.1	Penyuluhan kepada masyarakat.	14.660.400	14.925.050	130.936.400	126.335.000	126.335.000	14.660.400	14.765.050	127.276.500	15.548.817	126.335.000	100%	98,93%	97%	100%	100%		
1.19.1	Fasilitasi penyelesaian perselisihan Partai Politik.	10.000.000	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-
1.19.1	Pemuktahiran database Partai Politik.	13.600.000	5.500.000	3.109.500	-	-	12.400.000	5.450.000	2.650.500	126.702.300	-	91,18%	99,09%	85%	100%	100%	-	-
1.19.1	Fasilitasi bantuan keuangan Partai Politik dan bantuan social kepada Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (ORMAS/LSM).	10.000.000	13.750.000	8.383.000	8.851.000	8.851.000	9.807.000	-	8.383.000	61.419.450	8.851.000	98,07%	-	100%	100%	-	-	-
1.19.1	Fasilitasi pembinaan kepada Partai Politik.	10.000.000	5.000.000	23.831.800	11.693.000	11.693.000	9.880.000	5.000.000	12.007.800		11.693.000	98,80%	-	50%	100%	100%		



RENSTRA PERUBAHAN
BÅDAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

1.19.1	Posko Pemilihan Umum (PEMILU).	-	-	-	40.557.800	40.557.800						40.557.800				100%	100%			
1.19.1	Sosialisasi Perijinan Reklame non komersil.	-	-	-	15.094.000	15.094.000						15.094.000				100%	100%			
1.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	7.500.000	-	6.727.100	5.158.900	5.158.900	-	-	-			50.375.000	5.158.900	-	-	-	100%	100%	-	-
1.19.1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.	-	-	3.306.500	2.627.200	2.627.200	-	-		3.003.500		2.627.200	-	-		91%	100%	100%		
1.19.1	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan.	7.500.000	7.500.000	3.420.600	2.531.700	2.531.700	-		2.924.000	3.216.000	-	2.531.700	-	77.97%	94%	100%	100%			
1.19	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	7.500.000	7.500.000	7.297.900	7.214.500	7.214.500	-	-		11.958.000	-	7.214.500	-	-		100%	100%	-	-	
1.19.1	Monitoring dan evaluasi bantuan sosial kemasyarakatan.	7.500.000	7.500.000	7.297.900	7.214.500	7.214.500	5.246.000	-	5.905.900		7.214.500	69.95%	-	81%	100%	100%	-	-		
1.19	Program Kewaspadaan Dini/Daerah.	25.945.000	54.380.550	109.372.300	114.203.000	114.203.000	18.254.600	15.126.100				114.203.000	95,69%	99,67%	-	100%	100%	-	-	
1.19.1	Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kubu Raya.	13.755.000	13.755.000	13.662.600	17.701.000	17.701.000	13.755.000	-	12.650.600		17.701.000	100%	-	93%	100%	100%	-	-		
1.19.1	Penanganan konflik sosial masyarakat.	14.841.000	-	35.249.000	11.811.000	11.811.000	-	-	10.500.000		11.811.000	-	-	30%	100%	100%	-	-		
1.19.1	Pembinaan ketertiban masyarakat.	-	14.750.000	13.109.200	-	-	14.841.000	-	12.097.200		-	100%	-	92%	100%	100%				
1.19.1	Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kab. Kubu Raya.	-	-	47.351.500	49.475.000	49.475.000	-	-	41.576.500		49.475.000	-	-	88%	100%	100%				
1.19.1	Pemantauan orang asing.	-	13.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-		
1.19.1	Fasilitasi dan pencegahan narkoba.	-	12.115.550	-	-	17.578.000	-	-	-		17.578.000	-	-	-	100%	100%				
1.19.1	Implementasi Gerakan Revolusi Mental.	-	-	-	17.638.000	17.638.000					17.638.000				100%	100%				
1.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah.	-	-	14.628.600	29.957.050	29.957.050	-	-	12.429.600			29.957.050	-	-		100%	100%			
1.19.1	Penyusunan Database E-Formasi	-	-	3.394.350	20.153.350	20.153.350	-	-	2.986.350		20.153.350	-	-	88%	100%	100%				
1.19.1	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).	-	-	3.700.950	2.147.400	2.147.400	-	-	3.004.950		2.147.400	-	-	81%	100%	100%				
1.19.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik.	-	-	3.604.350	2.719.900	2.719.900	-	-	3.181.350		2.719.900	-	-	88%	100%	100%				
1.19.1	Penyusunan Standard Pelayanan.	-	-	3.928.950	2.263.000	2.263.000	-	-	3.256.950		2.263.000	-	-	83%	100%	100%				
1.19.1	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).	-	-	-	2.673.400	2.673.400					2.673.400				100%	100%				



2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol

Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti bertambahnya tingkat pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan serta memacu peningkatan kejadian kriminalitas merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan kondusivitas Kabupaten Kubu Raya.

Di sisi lain, terdapat peluang-peluang yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

- a. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk turut menjaga dan memelihara kondusivitas wilayah, misalnya melalui pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat);
- b. Menyusun database kerawanan sosial untuk mengurangi potensi kerawanan sosial melalui peningkatan upaya preventif dan pre-entif;
- c. Meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan untuk menurunkan potensi konflik yang berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);
- d. Meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik untuk menurunkan angka konflik politik serta mewujudkan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang berkualitas dengan mengarahkan pemilih menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan Pada Bidang Ideologi dan Ketahanan Bangsa :

1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.
5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan Moral Bangsa.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ORMAS dan LSM.
7. Belum Terhimpun Seluruh data ORMAS, PARPOL dan LSM di Kabupaten Kubu Raya.
8. Belum Maksimal Pelaksanaan Monev Terhadap Keberadaan ORMAS, PARPOL dan LSM di Kabupaten Kubu Raya.

B. Permasalahan Pada Bidang Kewaspadaan Dini Daerah :

1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
2. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di Bidang Kewaspadaan Dini.

C. Permasalahan Pada Bidang Politik Dalam Negeri :

1. Masih terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda.



2. Belum terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan DPR, DPRD PROPINSI, DPRD. dan sesuai Pasal 150 Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Pemilu.
3. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi.

D. Masalah Yang Bersifat Internal

- A. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di badan kesatuan bangsa dan politik kota gunungsitoli baik secara kuantitas maupun kualitas.
- B. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
- C. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan SKPD lainnya.

3.2. Telahan Visi, Misi, dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber daya dapat dipergunakan secara terarah dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan keberlangsungan hidup/berwawasan kelestarian lingkungan (*sustainable*) guna mewujudkan kondisi akhir yang diinginkan bersama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai:

1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;
2. Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan pembangunan;
3. Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
4. Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.



Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT,
TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS**

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. Bahagia; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap:

- a. Peningkatan derajat kesehatan
- b. Peningkatan derajat pendidikan
- c. Pekerjaan yang memadai
- d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
- e. Ketersediaan waktu luang
- f. Keharmonisan hubungan sosial
- g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
- h. Lingkungan hidup yang berkualitas
- i. Keamanan yang kondusif

2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:

- a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- e. Jaminan keadilan yang meliputi:



- 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
- 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
- 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakutan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)



Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum, dan demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses, komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerintah yang bersih dan berwibawa ditandai adanya pendektsian dini (*early warning*) dalam rangka terbangunnya zona anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kinerja birokrasi.

Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*) mencakup:

1. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak luas.
2. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun yang terpenting adalah sebagai subyek utama pembangunan. Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan produktif menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menciptakan manusia-manusia yang unggul, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, serta Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan kualitas kesehatan dapat dilihat dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat peningkatan daya beli, serta penurunan angka kemiskinan.

Dalam mendongkrak peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia memerlukan aksesibilitas dalam membuka konektivitas wilayah-wilayah yang terisolir dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Penunjang utama dalam pembangunan adalah ketersediaan dan kemajuan infrastruktur. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur pada satu sisi akan mendukung kemajuan di bidang kemajuan bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta di sisi lain akan mendukung kemajuan bidang ekonomi dan aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan, serta memberikan kegairahan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kualitas hidup mencakup juga upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mencakup upaya-upaya menciptakan kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang mencerminkan adanya keamanan, ketertiban dan keindahan, serta mencerminkan masyarakat yang tertib hukum.

Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal



Otonomi Desa merupakan kemampuan nyata pemerintahan desa dan masyarakat desa guna mengatur dan mengelola sumber daya desa melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan otonomi desa memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta pengelolaan dana pembangunan desa. Selain itu, penguatan otonomi desa juga memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan mencerminkan pemberdayaan: penguatan ekonomi kerakyatan; kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi usaha pelaku usaha usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); daya tarik investasi desa; pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan perdagangan; serta kapasitas dan perluasan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Kabupaten Kubu Raya mempunyai kekayaan nilai-nilai agamis. Nilai-nilai agamis tersebut menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan dan memelihara kehidupan berdampingan dengan latar belakang agama. Sikap dan perilaku toleransi tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi penyemangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka memperkokoh pilar-pilar kebangsaan (nasionalisme).

Misi Ke Lima :Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi



Perempuan sebagai tiang negara mempunyai peran yang sangat penting, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah guna memperbaiki kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kabupaten Kubu Raya, yakni upaya-upaya yang menggambarkan:

1. Pengarusutamaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat.
2. Perumusan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.
3. Dorongan tumbuhnya komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumber daya dan informasi program-program pemberdayaan, baik pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam bentuk:

1. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian keberpihakan pada peningkatan ekonomi perempuan.
2. Peningkatan fungsi dan organisasi perempuan dalam pemasaran soal program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.

Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

3.3. Cek dan Telaah Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Provinsi

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara



perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan kementerian/lembaga yang terkait.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas yaitu:

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang disusun oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu:

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis.

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius

Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah:

1. Rendahnya kepedulian dan komitmen *stakeholders* terkait penataan ruang.
2. Belum terpenuhinya SPM bidang penataan ruang.

Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan ruang melalui penganggaran program dan kegiatan penataan ruang dalam program kerja Badan Kesbangpol kedepan serta mengkoordinasikan permasalahan penataan ruang dengan SKPD dan *stakeholders* terkait.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 sudah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016, sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimaksud, maka baik dalam penyusunan RTRW Tahun 2016-2036, RPJPD Tahun 2009-2019, RPJMD I (2009 – 2014), maupun RPJMD II (2014 – 2019), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen tersebut.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, memerlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Badan Kesbangpol sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan serta peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan konsistensi dan integrasasi antar dokumen perencanaan sehingga terbangun keselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah.
2. Pengupayaan pencapaian indikator kinerja Daerah dan Indikator Kinerja SKPD yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
3. Peningkatan fungsi-fungsi koordinasi kepada SKPD sebagai bahan merumuskan program dan kegiatan yang memiliki dampak masif ke multi sektor (lintas SKPD)
4. Membangun base analitik perencanaan berdasarkan kecukuan data yang memadai untuk menunjang program strategis dan program inovasi daerah melalui penguatan kapabilitas SDM analitik Badan Kesbangpol.
5. Perluasan dan penguatan program/kegiatan pembangunan daerah yang berdimensi pada kebijakan inklusif pembangunan, tugas pokok konkren dan pembangunan.
6. Penguatan pelaksanaan permendagri 86/2018 melalui monitoring dan evaluasi terhadap kinerja daerah dan SKPD
7. Pengembangan kerja sama dan keterlibatan dengan multi sektor,(SKPD, Lembaga Universitas, CSO/NGO's dalam merumuskan program/kegiatan strategis daerah.
8. Penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Standar Pelayanan dan SPIP Badan Kesbangpol.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya. Tujuan jangka menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya adalah Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap *tujuan ditetapkan sasaran* yang akan dicapai selama 5 tahun periodesasi Rentra. Sesuai pembedahan terhadap RPJMD Kubu Raya 2019-2024, relevansi sasaran Badan Kesbangpol dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah secara spesifiik adalah mendukung pencapaian Misi Pertama dan Misi Kedua yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Tujuan :

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah

Sasaran :

Meningkatnya capaian kinerja Outcome Pembangunan Daerah

Misi Ke Dua: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Sasaran : Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Berdasarkan Visi, Tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD, maka Badan Kesbangpol sesuai dengan kewenangannya mendiskripsikan implementasi untuk mendukung visi dan Missi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periodesasi 2019-2024, sebagai berikut :



Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah	Meningkatnya capaian Kinerja Outcome Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase program RKPD yang konsisten dengan program di RPJMD	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase program Renja SKPD yang konsisten dengan program di RKPD	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase capaian outcome program di RPJMD	76%	80%	85%	87%	92%	95%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENSTRA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENJA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76%	80%	85%	87%	92%	95%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol

Strategi pelaksanaan kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun strategi yang digunakan Badan Kesbangpol untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance).

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Kenyamanan dalam organisasi Masyarakat.
2. Menjaga keutuhan masyarakat dengan Partai Politik.
3. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Kubu Raya.
4. Meningkatnya penanganan Konflik di Kabupaten Kubu Raya.
5. Menjaga Wawasan kebangsaan terhadap Pancasila dan Kebangsaan.
6. Meningkatnya kesadaran akan budaya Daerah.
7. Meningkatnya kerukunan Masyarakat dalam ber-agama.
8. Meningkatkan sikap dalam bersosial dan toleransi di Kabupaten Kubu Raya.

Misi KeDua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat).

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Melakukan pengawasan dan sosialisasi di daerah Kabupaten Kubu Raya.



Tabel 5.1.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI

VISI : Kabupaten Kubu Raya Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.					
MISI 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance).					
Sasaran Strategis di RPJMD-P : ST.2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan. ST.4. Meningkatkan SKPD mampu memenuhi standar pelayanan. ST.5. Meningkatkan kualitas aparatur SKPD pengampu pelayanan publik.					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	1	Meningkatkan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1	Peningkatan Penanganan Konflik Sosial Antar Umat Beragama
	Pembinaan Politik	1	Peningkatan Pembinaan PARPOL	1	Peningkatan Pembinaan Partai Politik Peserta (PEMILU) se Kabupaten
	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah.	1	Peningkatan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah	1	Peningkatan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.



5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah kepada pencapaian tujuan daerah.

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Arah kebijakan :

- 1) Penerapan system Informasi Perencanaan berbasis IT dalam proses penyusunan produk perencanaan di daerah (*one data-one entry-one solution*).
- 2) Mapping Indikator Kinerja yang dapat menjadi rujukan untuk proses penyusunan dokumen perencanaan, Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta produk perencanaan turunannya.
- 3) Meningkatkan Kapasitas pengampu dalam melakukan assesment program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk menghasilkan program dan kegiatan terintegrasi dengan pencaaaian sasaran Indikator Kinerja Daerah.
- 4) Meningkatkan fungsi-fungsi koordinasi kepada SKPD untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Pembangunan daerah kinerja Internal SKPD yang tertuang dalam RENSTRA PERUBAHAN dan RENJA SKPD
- 5) Peningkatan aktivitas Rapat kerja dengan lintas SKPD dalam rangka Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, serta Pelaporan untuk mencapai sasaran kinerja SKPD yang tertuang dalam RENSTRA PERUBAHAN dan RENJA SKPD.

Misi KeDua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat)

Arah kebijakan :



- 1) Peningkatan advokasi dan fasilitasi pengembangan pengembangan kawasan strategis perkotaan dan perdesaan, destinasi dan magnet wisata (wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi dan wisata kreatif/buatan), ekonomi kreatif serta terpadu dan berdaya *multiplier effect*.
- 2) Peningkatan advokasi dan fasilitasi program-program strategis dan inovasi daerah yang berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Peningkatan dan Perluasan akses kerjasama secara Internal (SKPD) maupun multi (Lembaga Universitas, CSO/NGO's) dalam implementasi kebijakan pembangunan strategis dan inovasi daerah



Tabel 5.2.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Jumlah konflik Sosial Antar Umat Beragama	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	1 Jumlah konflik Sosial Antar Umat Beragama	0	0	0	0	0	0	
2.			Pembinaan Politik.	2 Jumlah Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum (PEMILU) se Kabupaten.	4	5	12	21	21	21	
3.	.		Meningkatnya Pembinaan Terhadap Kewaspadaan	3 Jumlah Pembinaan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah.	2	5	10	8	8	8	



RENSTRA PERUBAHAN
BÄDAN KESATUAN BÄNGSA DAN POLITIK KÄBUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

			Dini/Daerah.									
4.			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	30	29	35	34	34	34	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BANKESBANGPOL

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya terutama mendukung misi pertama Bupati Kubu Raya yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :



**TABEL 6.1
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESBANGPOL**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan birokrasi	1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah4. Administrasi Umum Perangkat Daerah5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
2. Meningkatnya Sikap Nasionalisme dan Cinta tanah Air di Kubu Raya	1. PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Meningkatnya Sikap Berpolitik Yang Baik dan Terlaksananya Pemahaman Tentang Politik Di Kubu Raya	1. PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
4. Meningkatnya Kesejahteraan Lembaga dan ormas di Kubu Raya	1. PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Meningkatnya Toleransi dalam beragama, berbudaya, bersosialisasi dan Ekonomi.	1. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Meningkatnya kesadaran akan konflik sosial di Kubu Raya	1. PENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial



Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Beserta Pagu Indikatif Badan Kesbangpol
2019-2024

6.2. Tabel Rencana Program dan kegiatan beserta pagu indikatif Bakesbangpol

Bidang Urusan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
			Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Urusan Pemerintah																
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		5.554.250		2.334.500		6.260.000								42.100.310
	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.	Jumlah Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.	1 Dokumen	1 Dokumen	2.781.500	-	0	1 Dokumen	2.935.500							5 Dokumen	29.002.200
	Sistem Informasi Perencanaan SKPD.	Jumlah Informasi Perencanaan SKPD.	1 Dok	1 Dok	2.772.750	1 Dok	2.334.500	1 Dok	3.324.500							6 Dok	31.621.450
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Indikator Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.			387.404.300		314.924.500		791.508.700								4.658.324.377
	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat.	2 Orang	2 Orang	52.948.000	1 Orang	52.948.000	1 Orang	56.088.000							7 Orang	415.400.408
	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah jasa administrasi keuangan.		2 Orang	52.948.000	1 Orang	52.948.000	1 Orang	56.088.000							7 Orang	415.400.408
	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah jasa administrasi keuangan.		12 Kali	4.826.450	12 Kali	3.612.000	12 Kali	34.224.000							72 Kali	170.272.034
	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah jasa kebersihan kantor.			0		26.745.600	1 Orang	26.400.000							4 Orang	150.243.400
	Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah alat tulis kantor.		12 kali	23.374.700	12 Kali	23.418.900	12 kali	37.881.700							72 kali	245.627.170
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan.	12 Kali	12 Kali	1.341.750	12 Kali	1.840.000	12 Kali	4.290.000							72 Kali	25.680.640
	Penyediaan bahan	Jumlah bahan	12 Kali	12	4.800.000	12	3.600.000	12 Kali	4.800.000							12 Kali	34.676.800



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDÁN KESATUÁN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	bacaan dan peraturan perundang-undangan.	bacaan dan peraturan perundang-undangan.		Kali		Kali														
	Penyediaan makan dan minuman.	Jumlah makan dan minuman.	12 Kali	12 Kali	4.800.000	12 Kali	3.600.000	12 Kali	4.800.000										12 Kali	34.676.800
	Penyediaan makan dan minuman.	Jumlah makan dan minuman.	12 Kali	12 Kali	7.800.000	12 Kali	9.360.000	12 Kali	19.500.000										12 Kali	115.459.500
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah.	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah.	12 Kali	12 Kali	203.450.000	12 Kali	110.000.000	12 Kali	379.725.000										12 Kali	2.216.973.725
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah.	12 Kali	12 Kali	64.488.000	12 Kali	60.000.000	12 Kali	151.200.000										12 Kali	850.999.200
	Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP).	Jumlah Dokumen Standard Operasional Prosedur (SOP).	1 Tahun	1 Tahun	975.400		0		0										12 Kali	3.578.100
	Pemeliharaan Listrik dan Penambahan Daya.	Pemeliharaan Listrik dan Penambahan Daya.	12 Kali	12 Kali	23.400.000	12 Kali	23.400.000	12 Kali	77.400.000										12 Kali	429.413.400
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.	Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.			131.817.000		180.539.400		514.785.000											2.807.124.435
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jumlah perlengkapan gedung kantor.		-	0		0		0											0
	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.		4 Kali	19.800.000	2 Kali	31.057.000	2 Kali	110.190.000										12 Kali	562.248.790
	Pengadaan mebelier.	Jumlah mebelier.		2 Kali	10.417.000	1 Kali	6.050.000	1 Kali	203.595.000										8 Kali	961.351.395
	Sewa gedung kantor.	Gedung kantor.	1 unit	1 unit	83.625.000	1 Unit	96.533.450	1 Unit	130.000.000										6 Unit	866.488.450
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.		1 Kali	3.572.000	1 Kali	3.572.000	1 Kali	5.500.000										6 kali	41.493.500
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer.	Jumlah pemeliharaan komputer.		1 Kali	3.114.000	1 Kali	3.326.950	1 Kali	5.500.000										6 kali	36.614.450
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah.	1 Kali	1 Kali	64.488.000	1 Kali	60.000.000	1 Kali	151.200.000										6 Kali	850.999.200
	Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP).	Jumlah Dokumen Standard Operasional Prosedur (SOP).	12 Kali	12 kali	975.400	12 kali	0	12 kali	0										72 Kali	3.578.100
	Pemeliharaan Listrik dan Penambahan	Pemeliharaan Listrik dan	1 kali	1 kali	23.400.000	1 kali	23.400.000	1 kali	77.400.000										6 kali	429.413.400



RENSTRA PERUBAHAN
BÄDÄN KESATUAN BÄNGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

Daya.	Penambahan Daya.	Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.	131.817.000	180.539.400	514.785.000	2.807.124.435
Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jumlah perlengkapan gedung kantor.	-	0	0	0	0
Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.	4 unit	19.800.000	2 unit	31.057.000	14 unit
Pengadaan mebeler.	Jumlah mebeler.	2 Unit	10.417.000	1 unit	6.050.000	7 unit
Sewa gedung kantor.	Gedung kantor.	1 unit	83.625.000	1 unit	96.533.450	1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	1 unit	3.572.000	1 unit	3.572.000	6 unit
Pemeliharaan rutin/berkala komputer.	Jumlah pemeliharaan komputer.	1 unit	3.114.000	1 unit	3.326.950	6 unit
Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional.	-	1 unit	0	40.000.000	1 unit
Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Oprasional.	Jumlah pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	4 unit	11.289.000	1 unit	0	5 unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Terlaksanannya Program Peningkatan Disiplin Aparatur.		3.000.000	6.000.000	-	62.371.500
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya.	10 kali	3.000.000	12 kali	6.000.000	45 Kali
Pengadaan pakaian olahraga.	Jumlah pakaian olahraga.		0	0	0	0
Pengadaan pakaian batik.	Jumlah pakaian batik.		0	0	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.	Indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.		38.200.000	99.450.000	110.500.000	650.480.500
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi	4 kali	38.200.000	4 kali	99.450.000	24 kali



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDAN KESATUÁN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	undangan.	peraturan perundang-undangan.																			
	Diklat Intelijen Dasar, Lanjutan dan Tim Fasilitasi Pembauran Kebangsaan dan Diklat Keuangan.	Diklat Intelijen Dasar, Lanjutan dan Tim Fasilitasi Pembauran Kebangsaan dan Diklat Keuangan.			0		0		0									-		0	
	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD.	Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan SKPD.			0	-	0	-	0									-		0	
	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD.	Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan SKPD.			0		0		0									-		0	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.	Indikator Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.			31.866.100	-	15.964.000		16.175.500											156.187.096	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.	2 Dokumen	2 dok	20.036.000	2 dok	2.404.000	2 dok	2.527.000									12 dok		54.398.707	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Jumlah dokumen keuangan semesteran.	2 Dokumen	2 dok	3.088.100	2 dok	2.582.000	2 dok	2.670.500									12 dok		19.959.891	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun.	1 dok	1 dok	3.631.000	1 dok	2.684.000	1 dok	2.684.000									6 Dok		22.374.344	
	Penyusunan LPPD SKPD.	Jumlah dokumen LPPD SKPD.			0	1 dok	2.292.000	1 dok	2.292.000									5 Dok		12.929.172	
	Penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-DPA-DPPA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-DPA-DPPA) SKPD	3 dok	3 dok	5.111.000	3 dok	6.002.000	3 dok	6.002.000									18 dok		43.784.582	
	Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian (DUK, DP3, LP2P dan SDM) SKPD.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian (DUK, DP3, LP2P dan SDM) SKPD.	2 Dokument		0	-	0		0											0	
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah Prongram Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			183.525.600		180.426.500		1.730.496.000											8.534.657.936	
	Fasilitasi Koordinasi Peran dan Fungsi FKUB	Jumlah Agar dalam menjalankan ajaran agama dapat berlangsung dengan rukun,lancar dan damai	3 Kecamatan	4 Kecamatan	93.487.800	4 Kecamatan	97.862.200	1 kecamatan	365.487.100									24 Kecamatan		1.945.304.531	
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	3 Kecamatan	2 Kecamatan	44.170.500	9 Kecamatan	41.479.400	9 Kecamatan	114.508.000									32 Kecamatan		652.218.028	



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDÁN KESATUÁN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	Implementasi Penyuluhan Bela Negara	Jumlah Implementasi Penyuluhan Bela Negara	3 Kecamatan	3 Kecamatan	0	9 Kecamatan	41.084.900	9 Kecamatan	45.000.000								32 Kecamatan	262.010.400
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	45.867.300	0		9 Kecamatan	116.908.000								32 Kecamatan	622.965.328
	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan			0		0	9 Kecamatan	53220900								32 Kecamatan	246.998.197
	Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan			0		0	9 Kecamatan	116.908.000								32 Kecamatan	542.570.028
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah Data-data Ormas dan LSM			0		0	9 Kecamatan	116.908.000								32 Kecamatan	542.570.028
	Dialong Lintas Agama di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dialong Lintas Agama di Kabupaten Kubu Raya			0		0	9 Kecamatan	114.508.000								32 Kecamatan	531.431.628
	Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan di Kabupaten Kubu Raya			0		0	9 Kecamatan	114.508.000								32 Kecamatan	531.431.628
	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kubu Raya			0		0	9 Kecamatan	114.508.000								32 Kecamatan	531.431.628
	Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Kubu Raya			0		0	9 Kecamatan	114.508.000								32 Kecamatan	531.431.628
	Monitoring Kekayaan Budaya Daerah	Jumlah Monitoring Kekayaan Budaya Daerah			0		0	9 Kecamatan	114.508.000								32 Kecamatan	531.431.628
	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa	Jumlah Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa			0		0	9 Kecamatan	114.508.000								32 Kecamatan	531.431.628
	Ravitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	Jumlah Ravitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila			0		0	9 Kecamatan	114.508.000								32 Kecamatan	531.431.628
	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Program Pendidikan Politik Masyarakat			79.073.500		85.485.200		228.516.000									1.427.632.256
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik	1 Kecamatan	1 Kecamatan	8.020.500	1 Kecamatan	8.020.500	1 Kecamatan	10.000.000								6 Kecamatan	71.302.000
	Fasilitasi Pembinaan Partai Politik	Jumlah Tertata Susunan Kepengurusan Parpol	1 Kecamatan	1 Kecamatan	15.306.500	1 Kecamatan	14.509.000	1 Kecamatan	30.000.000								6 Kecamatan	180.738.500



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDÁN KESATUÁN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	Fasilitasi Perizinan Reklame Non Komersial	Jumlah Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi Masyarakat di	1 Kecamatan	1 Kecamatan	2.043.100	1 Kecamatan	7.142.500	1 Kecamatan	10.000.000							6 Kecamatan	70.689.600
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Politik Dalam Negeri	Jumlah Terjadinya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Politik Dalam Negeri			0	9 Kecamatan	55.813.200	9 Kecamatan	120.000.000							45 Kecamatan	612.733.200
	Pemetaan Situasi Kondisi Unsur-unsur yang mempengaruhi Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Terlaksananya Pemetaan Situasi Kondisi Unsur-unsur yang mempengaruhi Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kubu Raya			0			0	2 Kecamatan	14.629.000						5 Kecamatan	67.893.189
	Peningkatan Pemahaman Demokrasi Berdasarkan Pancasila yang	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Demokrasi yang Berdasarkan Pancasila			0			0	2 Kecamatan	14.629.000						5 Kecamatan	67.893.189
	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Terlaksananya Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya			0			0	2 Kecamatan	14.629.000						5 Kecamatan	67.893.189
	Sosialisasi Undang - Undang Pemilu	Jumlah Terlaksananya pemahaman terhadap pemilu	9 Kali		0			0								0	126.335.000
	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya			0			0	2 Kecamatan	14.629.000						5 Kecamatan	67.893.189
	Posko Pemilu	Jumlah Terpenuhinya Posko Pemilihan Umum	1 kecamatan	9 Kecamatan	53.703.400			0		0							94.261.200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Terwujudnya Prongram Pemberdayaan Kelembagaan			5.755.000		7.954.000		29.002.700								155.525.031



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDAN KESATUÁN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

		Kesejahteraan Sosial																
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Terjadinya Laporan Monev Bansos/Hibah	1 kecamatan	1 kecamatan	5.755.000	1 Kecamatan	7.954.000	1 kecamatan	10.000.000								36 Kecamatan	67.333.500
	Pembinaan Ormas LSM	Jumlah Menjaga hubungan yang harmonis,saling pengertian,saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat			0			0	9 Kecamatan	9.501.350							36 Kecamatan	44.095.765
	Verifikasi Ormas/LSM Hibah Bansos	Jumlah Terverifikasi Ormas/LSM Hibah Bansos			0			0	9 Kecamatan	9.501.350							36 Kecamatan	44.095.765
	Sosialisasi dan Kordinasi Program bantuan Sosial	Jumlah sosialisasi dan Kordinasi Progtam bantuan Sosial			0			0	9 Kecamatan	45.000.000							36 Kecamatan	208.845.000
	Fasilitasi pendapdangan kemitraan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi dan pendapdangan kemitraan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan			0			0	9 Kecamatan	8.000.000							4 Tahun	37.128.000
	Penataan pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Penataan pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan			0			0	9 Kecamatan	100.000.000							4 Tahun	464.100.000
	Bintek pengembangan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Bintek pengembangan organisasi kemasyarakatan			0			0	9 Kecamatan	35.000.000							4 Tahun	162.435.000
	Rakernis Mediasi, pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Rakernis Mediasi, pengawasan organisasi kemasyarakatan			0			0	9 Kecamatan	35.000.000							4 Tahun	162.435.000
	Pematauan, Evaluasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan dan organisasi, kemasyarakatan asing	Jumlah Pematauan, Evaluasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan dan organisasi, kemasyarakatan asing			0			0	9 Kecamatan	35.000.000							4 Tahun	162.435.000
	PROGRAM KEWASPADAAN DINI / DAERAH	Jumlah Prongram Kewaspadaan Dini di Daerah			131.012.900		149.376.100			342.939.550								2.016.131.502
	Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi FKDM	Jumlah Peran dan Fungsi FKDM	1 Kegiatan	2 Kegiatan	34.391.500	1 Kecamatan	25.184.450	1 Kecamatan	40.000.000								7 Tahun	262.916.950
	Penanganan Konflik Social Masyarakat di	Jumlah Penanganan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.022.250	2 Kegiatan	41.622.700	2 Kegiatan	50.000.000								8 Kegiatan	303.505.950



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDÁN KESATUÁN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	Kabupaten Kubu Raya	Konflik Social Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya	n	tan		tan		n									n	
	Rapat Kewaspadaan Tim Pemerintah Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.	Jumlah Pembinaan Ketertiban Masyarakat			0		0	4 Kegiatan	74.419.700							7 Kegitan	345.381.828	
	Rapat Rencana Aksi Tim Terpadu P4GN Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Terfasilitasinya Pencegahan Narkoba		2 Kecamatan	31.902.500		0	2 Kecamatan	44.215.800							12 Kecamatan	237.108.028	
	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan		0	2 Kegiatan	42.405.800	2 Kegiatan	44.215.800							10 Kegiatan	265.189.328	
	Implementasi Gerakan Revolusi Mental di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Implementasi Gerakan Revolusi Mental	1 Kegiatan	1 Kali	16.446.750	2 Kegiatan	24.920.650	1 Kegiatan	26.289.050							9 Kegiatan	181.012.881	
	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Tersedianya Data Orang Asing			0	2 Kecamatan	10.458.000	1 Kecamatan	11.268.000							6 Kecamatan	62.752.788	
	Fasilitasi Peran dan Fungsi KOMINDA	jumlah Komida	-	2 Kali	25.473.900		0		0								74.948.900	
	Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental			0		0	1 Kecamatan	45.531.200							4 Kecamatan	211.310.299	
	Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pembinaan Ketertiban Masyarakat			0		0		0								0	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur		4.776.000		4.784.500			7.000.000								72.004.550	



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDAN KESATUÁN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.258.000		2.450.000	1 Dokumen.	3.500.000								5 Dokumen.	23.624.900
	Penyusunan Database E-Formasi	Jumlah penyusunan Database E-Formasi	1 Dokumen		0		0		0									20.153.350
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 Dokumen		0		0		0									2.147.400
	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan	1 Dokumen		0		0		0									2.263.000
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik			2.518.000	1 Dokumen.	2.334.500	1 Dokumen	3.500.000							6 Dokumen	23.815.900	
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pengelolaan Keuangan daerah			41.203.00			0		0								73.352.900
	Peningkatan Penataan Aset Pada SKPD	Jumlah peningkatan Penataan Aset pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	28.650.00	0	1 Dokumen.	2.746.500	1 Dokumen.	3.500.000							6 Dokumen	67.140.000
	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Jumlah Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	12 Dok	12 Dok	3.003.000		0		0								48 Dok	5.902.900
	Bimbingan Teknis Manajemen Pengolahan Aset Daerah	Jumlah Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	12 Dok	12 Dok	9.550.000		0		0								48 Dok	19.300.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah								100%	11.458.740	100%	14.169.460	100%	16.880.180	100%		42.508.380
	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen tentang Penyusunan Dokumen Perancanaan								2 Dokumen	2.088.480	2 Dokumen	2.784.640	2 Dokumen	3.480.800	6 Dokumen		8.353.920
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen tentang Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								1 Dokumen	3.064.450	1 Dokumen	3.677.340	1 Dokumen	4.290.230	3 Dokumen		11.032.020
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen tentang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian								1 Dokumen	3.495.650	1 Dokumen	4.194.780	1 Dokumen	4.893.910	3 Dokumen		12.584.340



RENSTRA PERUBAHAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1 Dokumen	2.810.160	1 Dokumen	3.512.700	1 Dokumen	4.215.240	3 Dokumen	10.538.100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen tentang Administrasi keuangan Perangkat Daerah							100%	14.980.660	100%	16.660.630	100%	22.123.390	100%	53.764.680		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen tentang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1 Dokumen	3.476.000	1 Dokumen	4.171.200	1 Dokumen	4.866.400	3 Dokumen	12.513.600		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen tentang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							1 Dokumen	3.939.080	1 Dokumen	4.923.850	1 Dokumen	5.908.620	3 Dokumen	14.771.550		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen tentang Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							1 Dokumen	7.565.580	1 Dokumen	7.565.580	1 Dokumen	11.348.370	3 Dokumen	26.479.530		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100%	81.462.000	100%	83.354.400	100%	85.625.280	100%	250.441.680		
	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen tentang Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							1 Dokumen	9.462.000	1 Dokumen	11.354.400	1 Dokumen	13.625.280	3 Dokumen	34.441.680		
	Bimtek Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen tentang Bimtek Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan							10 ASN	72.000.000	10 ASN	72.000.000	10 ASN	72.000.000	30 ASN	216.000.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								100%	167.796.000	100%	201.355.200	100%	241.626.240	100%	610.777.440		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor							1246 ATK	36.700.000	1246 ATK	44.040.000	1246 ATK	52.848.000	1246 ATK	133.588.000		
	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Penyediaan							2000	12.496.000	2000	14.995.200	20000	17.994.240	20000	45.485.440		



RENSTRA PERUBAHAN
BÁDAN KESATUÁN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan							0 Lemb ar		0 Lem bar		Lemb ar		Lemb ar	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							12 kali	3.600.000	12 Kali	4.320.000	12 kali	5.184.000	36 kali	13.104.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah							12 Kali	115.000.000	12 Kali	138.000.000	12 Kali	165.600.000	36 Kali	418.600.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%	284.536.000	100 %	117.400.000	100%	117.400.000	100%	519.336.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							19 Unit	265.000.000	19 Unit	117.400.000	19 Unit	117.400.000	66 Unit	499.800.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Mebeuler yang terpenuhi							30 Unit	19.536.000	30 Unit	-	30 Unit	-	30 Unit	19.536.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%	285.380.000	100 %	342.456.000	100%	410.947.200	100%	1.038.783.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	720.000	3 Dokumen	1.820.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							12 kali	38.400.000	12 kali	46.080.000	12 kali	55.296.000	12 kali	139.776.000
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1 Kali	133.680.000	1 Kali	160.416.000	1 Kali	192.499.200	3 Kali	486.595.200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan							12 kali	112.800.000	12 kali	135.360.000	12 kali	162.432.000	12 kali	410.592.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%	20.190.000	100 %	24.228.000	100%	29.073.600	100%	73.491.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional							1 Kali	2.000.000	1 Kali	2.400.000	1 Kali	2.880.000	1 Kali	7.280.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan							1 Kali	18.190.000	1 Kali	21.828.000	1 Kali	26.193.600	1 Kali	66.211.600



RENSTRA PERUBAHAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	Mesin Lainnya																
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									100%	922.967.490	100%	1.107.560.988	100%	1.329.073.186	100%	3.359.601.664
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang trampil tentang kegiatan Fasilitasi Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Jumlah orang yang trampil tentang Kegiatan Implementasi Penyuluhan Bela Negara Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Penigkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Kebangsaan Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila							140 Orang 140 Orang 200 Orang 225 Orang 225 Orang	922.967.490	140 Orang 140 Orang 200 Orang 225 Orang 225 Orang	140 Orang 140 Orang 200 Orang 225 Orang 225 Orang	1.107.560.988	1.329.073.186	140 Orang 140 Orang 200 Orang 225 Orang 225 Orang	140 Orang 140 Orang 200 Orang 225 Orang 225 Orang	73.491.600
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								100%	1.745.882.332	100%	1.851.686.432		1.978.651.352	100%	3.359.601.664	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah peserta dalam sosialisasi/fasilitasi Bantuan							120 Orang 70	1.216.861.832	120 Orang 70	1.216.861.832	120 Orang 70 Orang	1.216.861.832	120 Orang 70 Orang	5.576.220.116	



RENSTRA PERUBAHAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	keuangan Partai Politik Jumlah peserta dalam sosialisasi/fasilitasi perizinan reklame non komersial Jumlah Orang Yang Paham Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya							Orang 50 Orang		Orang 50 Orang		50 Orang		50 Orang	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Paham Peningkatan Pemahaman Demokrasi yang Berdasarkan Pancasila Jumlah Orang Yang Paham Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya							50 Orang 50 Orang	264.840.500	50 Orang 50 Orang	317.808.600	50 Orang 50 Orang	381.370.320	50 Orang 50 Orang	3.650.585.496
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daera	Jumlah dokumen hasil Monitoring yang mengikuti evaluasi pelaporan politik dalam negeri Jumlah Dokumen hasil Pemetaan Situasi Kondisi Unsur-unsur yang mempengaruhi Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kubu Raya							1 Dokumen 1 Dokumen	264.180.000	1 Dokumen 1 Dokumen	317.016.000	1 Dokumen 1 Dokumen	380.419.200	1 Dokumen 1 Dokumen	964.019.420
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								100%	2.982.474.142	100%	3.578.968.970	100%	4.294.762.764	100%	961.615.200



RENSTRA PERUBAHAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang Yang Paham Sosialisasi dan Koordinasi Program Bantuan Sosial/BANSOS Jumlah orang yang trampil tentang Pembinaan Ormas LSM 75 orang Jumlah Fasilitasi dan Pendampingan Kemitraan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Jumlah dokumen dan Rencana aksi Tim Terpadu terhadap ormas							20 Orang 75 Orang 1 Dokumen	2.982.474.142	20 Orang 75 Orang 1 Dokumen	3.578.968.970	20 Orang 75 Orang 1 Dokumen	4.294.762.764	20 Orang 75 Orang 1 Dokumen	10.856.205.877
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								100%	1.776.264.400	100%	1.789.265.742	100%	1.804.867.352	100%	10.856.205.877
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Fasilitasi Koordinasi peran dan Fungsi FKUB Jumlah orang yang paham tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Kubu Raya Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Kubu Raya							328 Orang 130 Orang 225 Orang	1.711.257.690	328 Orang 130 Orang 225 Orang	1.711.257.690	328 Orang 130 Orang 225 Orang	1.711.257.690	328 Orang 130 Orang 225 Orang	5.370.397.494



RENSTRA PERUBAHAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daera	Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Monitoring Kekayaan Budaya Daerah								225 Orang	65.006.710	225 Orang	78.008.052	225 Orang	93.609.662	225 Orang	236.624.424
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									100%	225.856.560	100 %	271.027.872	100%	325.233.446	100%	822.117.878
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang trampil tentang Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi FKDM Jumlah Dokumen hasil Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Jumlah Orang yang memahami Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kubu Raya								100 Orang 1 Dokument 9 Kali	484.246.360	100 Orang 1 Dokument 9 Kali	581.095.632	100 Orang 1 Dokument 9 Kali	697.314.758	100 Orang 1 Dokument 9 Kali	1.762.656.750



RENSTRA PERUBAHAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah Kabupaten Kubu Raya Jumlah Dokumen hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Konflik sosial Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokument 1 Dokumen	225.856.560	1 Dokument 1 Dokumen	271.027.872	1 Dokument 1 Dokumen	325.233.446	1 Dokument 1 Dokumen	822.117.878
--	---	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indicator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indicator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.



4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sesuai dengan Visi Bupati Terpilih yaitu Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, Dan Religius maka terdapat 5 misi yang merupakan penjabaran dari visi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat.
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal.
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat.
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
- Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah
- Sasaran : Meningkatnya capaian kinerja Outcome Pembangunan Daerah
- Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat
- Tujuan : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi



RENSTRA PERUBAHAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

pembangunan daerah

Sasaran : Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah



Tabel 7.1
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (n-1)	Target Capaian						Kondisi Akhir	
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Cleon Governace)	T.1	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Reformasi Birokrasi	S.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	B
				Indeks Kepuasan Masyarakat	S.2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
				Nilai SAKIP	S.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	3	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	BB	BB
				Opini BPK		Opini BPK	4	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatkan Penguatan Aktifitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat	T.7	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat	15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	S.30	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	39	Jumlah Kasus konflik antar agama	Kasus	0	0	0	0	0



BAB VIII

PENUTUP

1. Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Kesbangpol, yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program sampai dengan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan merupakan pedoman bagi seluruh bidang di lingkungan unit kerja Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Diharapkan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Perubahan Badan Kesbangpol ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi, yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Review Renstra Perubahan berikutnya atau sebagai bahan penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Periode Tahun 2024-2029.
4. Selanjutnya Renstra Perubahan ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja, Renstra Perubahan ini akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan Badan Kesbangpol yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Badan Kesbangpol).
5. Apabila sampai Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2019-2024 ini berakhir dan belum ditetapkannya Renstra Perubahan Badan Kesbangpol



RENSTRA PERUBAHAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

periode berikutnya, maka Renstra Perubahan Badan Kesbangpol ini masih digunakan untuk penyusunan renja tahun perencanaan berikutnya.